

ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI PAPUA (*Goal Analysis of Forest Management Unit Development in Papua*)

Oleh/By

Irma Yeny¹⁾ & Haryatno D.P.²⁾

¹⁾ Balai Penelitian Kehutanan Manokwari. Jl. Inamberi Susweni PO Box 159,
Manokwari-Papua Barat, e-mail : irmayeny.kemenhut@yahoo.com

²⁾ Pusat Penelitian Perubahan Iklim dan Kebijakan. Jl. Gunung Batu, Bogor

Diterima 5 Februari 2013, direvisi 20 Maret 2014, disetujui 28 Maret 2014

ABSTRACT

In the context of planning, Development goals of Forest Management Unit (FMU) should be defined as target indicators, strategies to achieve the goals and development plans and to manage activities. FMU in Papua Province is in the stages of institutional formation and its policy supporting tools like other provinces in Indonesia. This study aimed to identify development goals of FMU based on the perception of stakeholders, so it could be used as measurable performance indicators. The research was conducted on the model FMU of Papua and West Papua provinces. Data were collected through interviews using structured questionnaires, and then analyzed by Analysis Hierarchy Process (AHP). The results showed that the goals of forest function maintaining and environment carrying capacity were the important factors of FMU Development in Papua. These were in line with development objectives of FMU development written on document of FMU design and stakeholder interests that should ensure the sustainability of ecological functions. There were six measurable outcome indicators to obtain the development of FMU in Papua.

Keywords : FMU development goals, affecting factors

ABSTRAK

Dalam konteks perencanaan, tujuan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mutlak didefinisikan sebagai indikator sasaran, strategi untuk mencapai sasaran dan pengembangan rencana kerja serta mengelola aktivitas-aktivitasnya. KPH di Propinsi Papua dalam tahapan pembentukan kelembagaan serta perangkat kebijakan pendukungnya sebagaimana daerah lainnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tujuan pembangunan KPH berdasarkan persepsi pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan indikator kinerja yang dapat diukur. Penelitian dilakukan pada KPH Model Provinsi Papua dan Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan responden dengan bantuan kuesioner yang terstruktur. Data dianalisis dengan metode Analisis Hirarki proses (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan mempertahankan fungsi hutan dan daya dukung lingkungan merupakan faktor penting dalam tujuan pembangunan KPH di Papua. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan KPH yang tertuang dalam dokumen rancang bangun KPH Model serta berdasarkan kepentingan *stakeholders* yaitu menjamin kelestarian fungsi ekologi. Dalam tujuan tersebut terdapat 6 (enam) indikator sasaran yang dapat diukur untuk mencapai tujuan pembangunan KPH Papua yang telah ditetapkan.

Kata kunci : Tujuan pembangunan KPH, Faktor-faktor yang mempengaruhi

I. PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Hutan Papua merupakan hutan tropis dunia, selain hutan tropis Amazone dan hutan tropis Kongo dengan ekosistem hutan hujan tropis terbesar paling lengkap dan sangat unik terbentang dari pesisir pantai sampai alpin. Hutan Papua termasuk bagian biodiversitas dunia karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati endemik sangat tinggi. Hutan Papua juga menjadi benteng terakhir hutan tropis Indonesia dalam mengendalikan perubahan lingkungan dan iklim Indonesia (Kapisa, 2008).

Saat ini hutan Papua sudah mengalami degradasi lahan mencapai 0,13 juta hektar per tahun. Degradasi disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu pembalakan legal, konversi ke penggunaan non hutan dan pembalakan illegal. Pembalakan legal merupakan ancaman terbesar lajunya degradasi di Papua. Persoalan yang dihadapi masyarakat adat Papua selama ini merupakan efek dari hadirnya perusahaan-perusahaan yang hanya mengejar keuntungan, tetapi tidak memperhatikan kelestarian hasil (Amafnini, 2008).

Untuk memastikan agar pengelolaan hutan di Papua tidak mengulang sejarah kehancuran hutan alam sebagaimana wilayah-wilayah lain di Indonesia (Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan) maka pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) menjadi program prioritas pembangunan kehutanan di Papua (Kayoi, 2008). Secara umum, pengertian KPH adalah merupakan areal/wilayah yang didominasi oleh hutan dan mempunyai batas yang jelas, yang dikelola untuk memenuhi serangkaian tujuan yang ditetapkan secara eksplisit sesuai dengan rencana pengelolaan jangka panjang (Dephut, 2009).

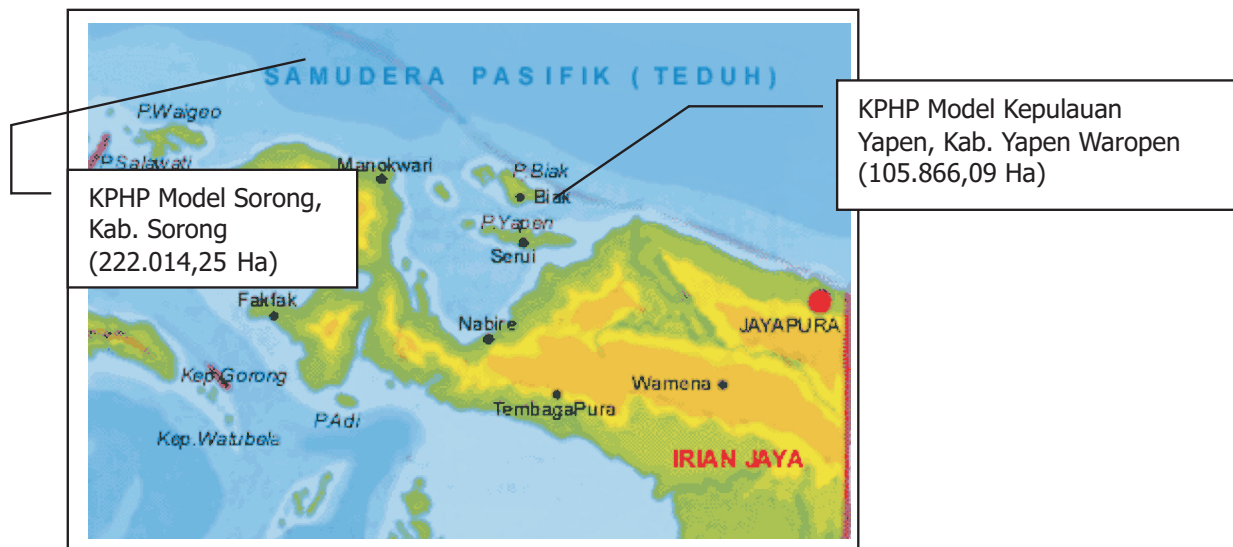
KPH sebagai unit pengelola hutan akan selalu dihadapkan pada persoalan manajemen pengelolaan dari waktu ke waktu. Oleh

karena itu aspek manajemen pengelolaan baik perencanaan, penataan, kepemimpinan dan pengendalian sangat penting dalam menentukan arah pengelolaan unit usaha KPH. Dalam perencanaan harus dengan tegas mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola aktivitas-aktivitas untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bagi organisasi. Tujuan organisasi menurut (Robbins dan Coulter, 2002) merupakan pernyataan resmi tentang apa yang dikatakan organisasi dan yang ingin diyakini para pemangku kepentingan. Tujuan juga merupakan komitmen suatu lembaga. Komitmen itu menurut Steer dan Porter (1987) akan melahirkan (1) keyakinan kuat akan nilai-nilai tujuan organisasi, (2) kemauan untuk memberikan upaya keras bagi kepentingan organisasi, (3) keyakinan kuat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi. Oleh karena itu penentuan tujuan suatu unit usaha selanjutnya akan mempengaruhi perencanaan pengelolaan selanjutnya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa yang menjadi tujuan pembangunan KPH di Papua dan bagaimana mengukur keberhasilan tujuan tersebut?. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor prioritas dalam pembangunan KPH di Papua serta tujuan pengelolaan KPH di Papua berdasarkan persepsi pemangku kepentingan (pemerintah daerah, masyarakat adat, pemerhati lingkungan) agar dapat dijadikan kriteria dan indikator hasil kerja yang dapat diukur.

II. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-september 2010 di Provinsi Papua (KPH Model Yapen) dan Papua Barat (KPH Model Sorong).



Gambar 1. Lokasi Penelitian
Figure 1. Research area

KPH Unit XIX Yapen secara administrasi berada di dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Yapen di Provinsi Papua. KPH Unit XIX ditetapkan Sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) disebabkan karena dominasi 85,74% luasan berada pada Hutan Produksi. Berdasarkan wilayah pengelolaan areal KPH berada dalam wilayah kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen. Sedangkan KPH Unit II Sorong secara administrasi berada di dalam wilayah administrasi Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat. KPH Unit II Sorong ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) disebabkan karena dominasi 92,23% luasan berada pada hutan produksi. Berdasarkan wilayah pengelolaan areal KPH unit II Sorong berada dalam wilayah kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan sumber data

Metode yang dilakukan adalah metode deskriptif dengan teknik survey. Data yang

dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner meliputi informasi terkait 1) faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembangunan kelembagaan KPH, 2) tujuan pembangunan KPH berdasarkan persepsi pemangku kepentingan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen insansi terkait berupa rancangan pembangunan KPH Model (rancangan pengelolaan kawasan dan implementasinya).

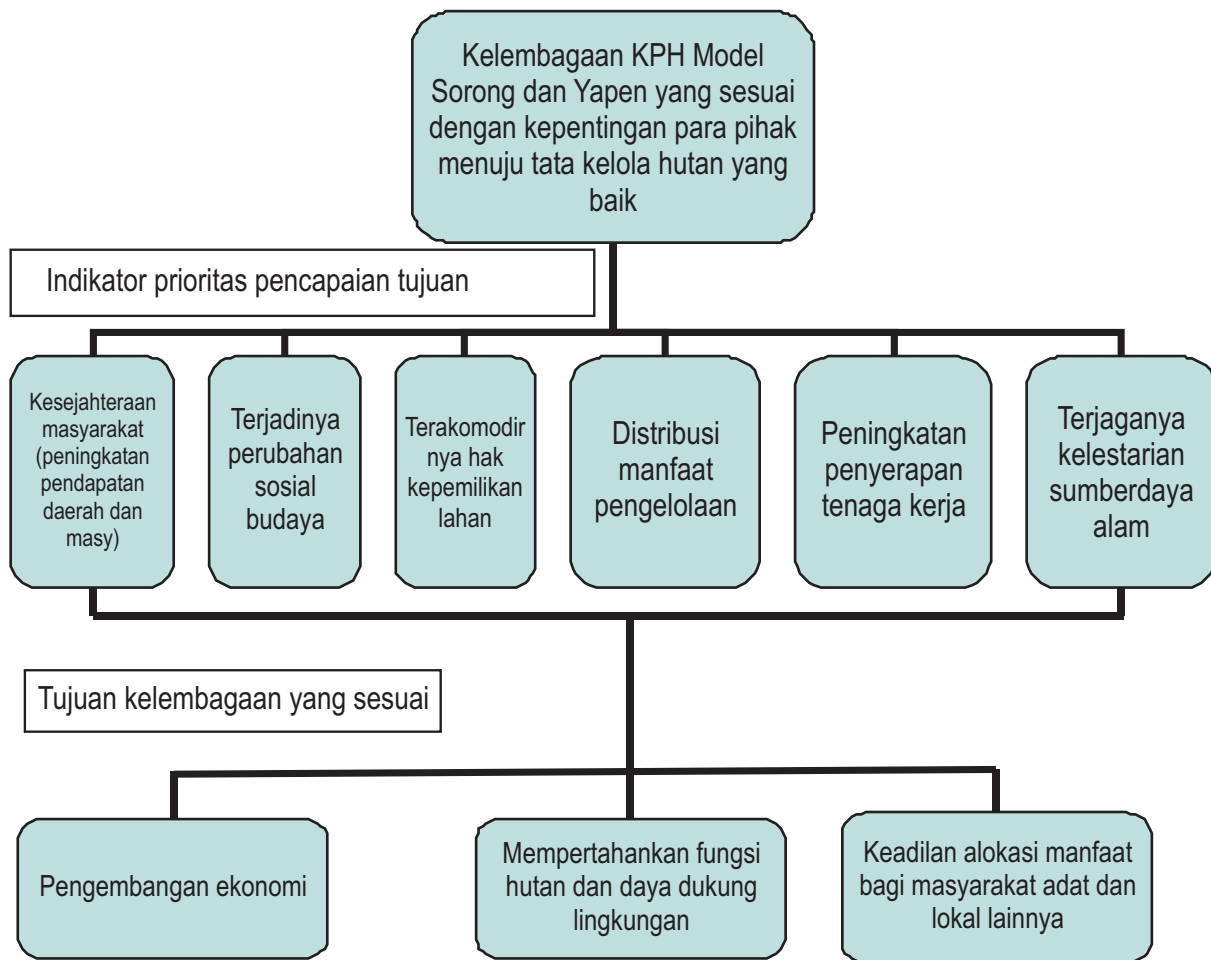
Responden merupakan orang yang dianggap memahami konsep pembangunan KPH di Papua dan merupakan keterwakilan dari instansi terkait (BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi/kabupaten dan tokoh masyarakat yang berada pada unit KPH, LSM dan pakar).

2. Variabel penelitian

Identifikasi tujuan pengelolaan KPH dilakukan dengan membuat alternatif-alternatif tujuan pengelolaan dengan mempertimbangkan kepentingan pemangku

kepeningan. Tujuan pengelolaan yang dijadikan alternatif merupakan implemetasi aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Dari ketiga alternatif tujuan tersebut disusun alternatif

indikator prioritas untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik Analisis Hirarki Proses (AHP). Secara garis besar alternatif tujuan disusun secara hirarki (Gambar 2).



Gambar 2. Hirarki proses dalam analisis tujuan kelembagaan KPH.
 Figure 2. The hirarchie of the analysis of FMU goal setting

Dari matriks ini akan terukur kontribusi masing-masing indikator dalam mencapai tujuan kelembagaan yang sesuai dengan kepentingan para pihak menuju tata kelola hutan yang baik. Untuk memperoleh tujuan yang diharapkan maka pengisian daftar pertanyaan dilakukan dengan membandingkan secara berpasangan antara masing-masing

indikator. Perbandingan dilakukan secara logis dan konsisten.

C. Analisis Data

Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya diolah secara kualitatif deskriptif dengan mengkontruksikan berbagai informasi menjadi suatu alternatif tujuan pembangunan

KPH Papua. Selanjutnya alternatif-alternatif tujuan diberikan bobot oleh responden. Kisaran pembobotan menggunakan angka ganjil yang dimulai dari angka 1-9. Makna dari masing-masing nilai berdasarkan nilai terkecil berturut-turut : sama penting, sedikit lebih penting, lebih penting, jelas lebih penting dan pasti lebih penting.

Alternatif tujuan yang telah diberikan bobot dimasukkan dalam *software* AHP sehingga menghasilkan tren bobot pada alternatif tujuan. Alternatif kebijakan yang memiliki nilai bobot tertinggi memperoleh prioritas tertinggi untuk dipilih.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan yang menjadi Landasan

Pembangunan KPH di Indonesia telah menjadi komitmen pemerintah dan masyarakat (para pihak), yang telah dimandatkan melalui UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan PP No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, KPH telah menjadi prasyarat terselenggaranya pengelolaan hutan lestari (PHL). KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya sehingga dapat dikelola secara efisien dan lestari serta secara operasional harus memenuhi 3 (tiga) komponen kegiatan, yaitu:

1. Pembentukan unit-unit wilayah KPH pada seluruh kawasan hutan sehingga ada kepastian wilayah kelola;
2. Pembentukan institusi pengelola pada setiap unit KPH, sehingga ada kepastian penanggung jawab pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di tingkat tapak;

3. Penyusunan rencana pengelolaan hutan di tingkat KPH sebagai penjabaran operasional pencapaian target-target rencana kehutanan tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Melalui pembangunan KPH diharapkan dapat dicapai sasaran-sasaran berikut:

1. Mengurangi degradasi hutan;
2. Tercapainya PHL;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal;
4. Stabilisasi penyediaan hasil hutan;
5. Mengembangkan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan;
6. Percepatan rehabilitasi dan reforestasi;
7. Memfasilitasi akses pada pasar karbon.

Untuk menjalankan fungsi pokok dan sasaran terbangunnya KPH maka perlu dilakukan penetapan dan pembentukan kelembagaan KPH. Pada tahap penetapan diperlukan beberapa langkah yaitu : 1) penyusunan rancangbangun KPH yang dilaksanakan oleh gubernur, 2) arahan pencadangan diberikan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan rancangbangun yang diajukan oleh gubernur, 3) pembentukan, disusun oleh bupati berdasarkan arahan Menteri Kehutanan yang selanjutnya gubernur mengusulkan penetapannya kepada Menteri Kehutanan, 4) penetapan, menteri menetapkan KPH berdasarkan usulan pembentukan dari gubernur. Tahap berikutnya setelah penetapan KPH adalah pembentukan kelembagaan pengelola unit KPH, sehingga akan terbangun wujud riil KPH ditingkat tapak yang antara lain meliputi penetapan wilayah pengelolaan dan kelembagaan pengelola serta jenis aktifitasnya (Karsudi, 2010).

Sebagai wujud riil pengelolaan di tingkat tapak saat ini sedang dipersiapkan kelembagaan maupun kebijakan KPH Model di Papua dan Papua Barat. Sejalan dengan pembentukan kelembagaan KPH model sudah selayaknya dibangun dengan kemampuan

pelaksana pengelolaan hutan yang berbasis sumberdaya hutan termasuk dapat mengembangkan kepentingan para pihak, mengembangkan investasi, penyediaan informasi lebih lengkap tentang sumberdaya alam dan permasalahannya sebagai landasan penetapan manajemen pengelolaan. Kesemuanya itu harus didukung oleh terlaksananya implementasi perundang-undangan yang telah disesuaikan dengan kondisi setempat.

Berdasarkan kemampuan pelaksana dan tingkat kepentingan pengelola hutan di Papua terdapat faktor-faktor yang menjadi prioritas dalam pembangunan kelembagaan KPH di Papua serta visi dan misi pembangunan KPH yang menjadi tujuan utama pengelolaan hutan di Papua.

B. Faktor-Faktor Prioritas dalam Pembangunan KPH di Papua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembentukan kelembagaan KPH di Papua antara lain kebijakan, sumberdaya manusia dan pendanaan.

1. Kebijakan

Secara umum kebijakan merupakan cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan maupun implementasinya di lapangan dengan menggunakan instrumen tertentu (Djogo, *et al.*, 2003).

Salah satu persoalan yang mendasar dari upaya pembentukan kelembagaan KPH Model terkait kebijakan adalah kurangnya surat keputusan yang merupakan dasar hukum (peraturan daerah/gubernur/bupati) yang dapat digunakan untuk membentuk suatu unit manajemen yang selanjutnya digunakan untuk menjalankan kebijakan dalam konteks perencanaan dan strategi yang telah disusun dalam dokumen rancangbangun KPH Model.

Kebijakan pendukung yang telah ada saat ini untuk pembentukan kelembagaan KPH Model yaitu peraturan Bupati Sorong No. 31 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah di Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorong No. 431 tahun 2008 tentang penjabaran uraian dan fungsi dinas kehutanan Kabupaten Sorong. Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi, Setda dan Sekwan DPRD, Dinas-dinas dan lembaga teknis daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Didalam peraturan Bupati tersebut menyebutkan susunan organisasi dinas-dinas lembaga teknis daerah dapat mengakomodir UPTD yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah kepala dinas atau setara dengan eselon III. Peraturan Bupati ini dianggap belum mampu mengakomodir kebutuhan suatu unit KPH. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari peraturan Gubernur tersebut saat ini sedang di proses peraturan Bupati tentang kelembagaan KPH Model Yapen dan Sorong dalam bentuk UPTD oleh bagian Hukum dan organisasi pada pemerintah daerah setempat sehingga masih membutuhkan waktu dalam penerbitan payung hukum kelembagaan yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan KPH.

2. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan tugas dan fungsinya maka, organisasi KPH menyelenggarakan fungsi management dalam bentuk pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, perlindungan dan konservasi. Sedangkan instansi Kementerian Kehutanan, Dinas Provinsi/Kabupaten akan lebih banyak berperan menyelenggarakan fungsi administrasi dan pengurusan hutan.

Organisasi sebagai bagian dari kelembagaan memiliki tiga unsur, yaitu manusia, kerjasama, dan tujuan bersama. Tiga unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri,

akan tetapi saling kait atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Organisasi KPH tidak terlepas dari suatu management yang dikelola oleh sumberdaya manusia yang profesional. Permasalahan lainnya dalam membentuk organisasi KPHP

Model sebagai bagian dari kelembagaan adalah kebutuhan sumberdaya manusia yang profesional. Berdasarkan struktur organisasi pada KPH Model yang telah dituangkan dalam dokumen rancangbangun KPHP Model maka kebutuhan sumberdaya manusia berdasarkan kompetensinya tertuang dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan sumberdaya manusia berdasarkan kompetensi serta ketersediaannya pada Dinas Kehutanan Kabupaten.

Table 1. Human sesources needs based on competency and its availability in the Forest Service at the district level.

No.	Jabatan	Kualifikasi	Kebutuhan	Ketersediaan	
				Dishut Sorong	Dishut Yapen
1.	KKPH	Pangkat Min III d Pendidikan Kehutanan	1	2	1
2.	Ka.Bag T.U	Min 10 thn berkopetensi di bid. Kehutanan Pangkat Min III c Pendidikan S1	1	3	1
3.	Kasubbag Keuangan/ Perencanaan Umum/ Keuangan	Ekonomi/Manag/ D3 Tata usaha Min 8 thn berkopetensi di bid. Tata usaha Pangkat Min III b Pendidikan S1	3	3	3
4.	KBKPH	Ekonomi/Manag/ D3 Tata usaha Min 6 thn berkopete nsi di bid. Tata usaha Pangkat Min III b Pendidikan S1 Kehutanan	1 s/d 3	9	1
5.	Kepala seksi (peman- tapan dan peredaran HH/perlindungan dan pengamanan hutan/ penataan dan pem-binaan hutan/pemberdayadan masyarakat	Min 6 thn berkopetensi di bid. Kehutanan Pangkat Min III b Pendidikan S1 kehutanan	1 s/d 4	0	0
6.	Kepala resort	Min 6 thn berkopetensi di bid. kehutanan Pangkat Min III a Pendidikan S1	1 s/d 3	8	4
7.	Mandor	Kehutanan/D3 Kehutanan Min 4 thn berkopetensi di bid. kehutanan SKMA/SLTA		4	2
8.	Kepala Kelompok Kerja	pengalaman kerja 3 tahun memiliki kopetensi di bidangnya membantu mandor			
9.	Kelompok kerja	tenaga non skill tenaga kontrak atau tenaga kerja masyarakat lokal binaan KPH			
Total			15	29	12

Tabel 1, menunjukkan adanya kelebihan dan kekurangan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) sesuai dengan kompetensinya. Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong mempunyai kelebihan SDM 14 orang sementara Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen masih kekurangan SDM sesuai kompetensi sejumlah 3 (tiga) orang. Kekurangan sumberdaya manusia pada Dinas Kehutanan Yapen disebabkan adanya moratorium Pegawai Negeri Sipil yang telah terjadi hampir 3 (tiga) tahun. Beberapa alasan moratorium tersebut adalah ketidakmampuan APBD untuk membiayai tenaga kerja baru serta adanya ketidakstabilan pemerintahan daerah akibat belum adanya bupati definitif. Untuk mengatasi hal tersebut responden mengharapkan dapat dilakukan perbantuan sumber daya manusia dari Dinas Kehutanan Provinsi setempat maupun dengan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan sehingga dapat mengatasi permasalahan kompetensi SDM yang dibutuhkan.

3. Pendanaan

Prinsip penyusunan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan (1) Kewenangan pemerintah yang dimiliki daerah (2) Karakteristik potensi dan kebutuhan daerah (3) Kemampuan keuangan daerah (4) Ketersediaan sumber daya manusia (5) Pengembangan pola kerja sama antar daerah (Publik. PustakaNet, 2008).

Terkait dengan pembentukan kelembagaan KPH model sebagai perangkat daerah (UPTD) maka kemampuan keuangan daerah juga merupakan masalah yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan organisasi tersebut. Dalam menjalankan pemerintahan daerah, sumber dana yang digunakan meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam hal ini potensi daerah diharapkan mampu menyokong ketersediaan pendapatan daerah.

Sementara disisi lain UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah mengamankan sebagian kewenangan publik di serahkan kepada pemerintah daerah. Implikasi dari undang-undang tersebut adalah peningkatan kebutuhan anggaran dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diberikan. Kondisi ini menyebabkan anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari fungsi dan beban tugas yang diamanatkan dalam UU tersebut.

Berdasarkan statistik Kabupaten Kepulauan Yapen penggunaan anggaran pendapatan daerah mencapai 80% untuk kebutuhan rutin berupa belanja tidak langsung. Kondisi ini menyebabkan banyak program pembangunan di daerah termasuk pembentukan KPH belum memperoleh dukungan dana yang optimal sehingga terkesan lambat. Hal tersebut diperberat lagi dengan aksesibilitas yang rendah sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi dunia usaha dalam mendukung pengelolaan hutan.

C. Tujuan Pembangunan KPH Di Papua

Dalam menetapkan tujuan organisasi langkah pertama yang harus dilakukan adalah meriview visi dan misi (Robbins dan Coulter., 2002). KPH Papua yang merupakan unit pengelolaan hutan Papua telah memiliki visi dan misi yang merupakan refleksi visi dan misi pembangunan kehutanan di Papua. Visi pembangunan hutan di Papua adalah terwujudnya pengelolaan kehutananan yang lestari guna menunjang pembangunan daerah. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi yang terkait bidang kehutanan yang selanjutnya menjadi tahapan proses yang dapat diacu oleh semua pihak di jajaran dinas kehutanan antara lain : 1) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional; 2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi untuk mencapai manfaat

lingkungan, sosial budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari; 3) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS); 4) mendorong peran serta masyarakat; 5) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan; 6) memantapkan koordinasi bidang kehutanan antara provinsi dan kabupaten.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) kriteria tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan di Papua yaitu : 1) Mempertahankan fungsi hutan dan daya dukungnya, 2) Pengembangan ekonomi, 3) Keadilan alokasi

manfaat bagi masyarakat adat. Kriteria tujuan ini merupakan tujuan strategis yang berhubungan dengan bidang kerja organisasi yang akan dibentuk. Untuk merefleksikan visi dan misi tersebut, maka permasalahan yang terdapat pada masing-masing wilayah KPH Model diidentifikasi sehingga dapat dijadikan faktor-faktor dalam indikator penetapan tujuan.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada penetapan tujuan pengelolaan pada KPH Model Sorong dan KPH Model Yapen tersaji pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penetapan tujuan pada KPH Model Sorong
Table 2. Factors that influence the goal setting in KPH Model Sorong

No.	Situasi	Faktor-faktor
1.	Hutan Primer	Tingginya potensi produksi kayu dan non kayu yang dapat dikelola dan mampu menjadi sumber penghasilan daerah.
2.	LOA/Hutan sekunder	Tingginya Laju ekstraksi hasil hutan dan suksesi hutan yang mampu meningkatkan degradasi hutan.
3.	Pemukiman dan pemekaran kampung	Tingginya laju pembangunan pemukiman dan pemerakaran kampung yang dan tingginya kebutuhan akan kayu.
3.	Jaringan jalan	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada perubahan sosial ekonomi masyarakat.
4.	Penambangan bahan galian	Terdapat penambangan galian C yang mampu mengakibatkan degradasi lahan.
5.	Industri kayu (<i>sawmill</i>)	Jumlah kapasitas industri kayu gergajian menuntut ketersediaan kayu rakyat
6.	Perladangan berpindah	Laju kebutuhan lahan pertanian masyarakat akan berdampak pada pembukaan areal hutan
7.	Pemungutan kayu masyarakat	Tingginya kebutuhan kayu rakyat mendorong tingginya pemungutan kayu rakyat yang tidak berijin.

(sumber : Rancangbangun KPH Model Sorong Papua Barat, 2010)

Tabel 3. Faktor-faktor berpengaruh terhadap penetapan tujuan pada KPHP Model Yapen
Table 3. Factors that influenced the goal setting in KPH Model Yapen

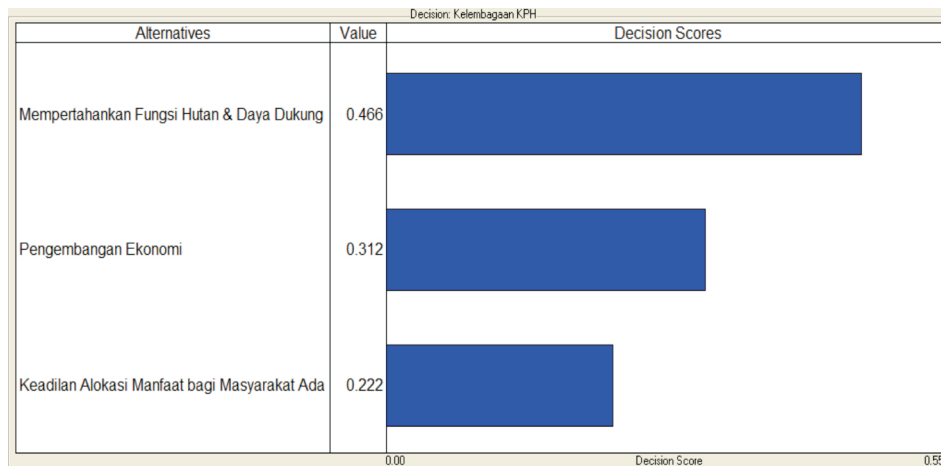
No.	Situasi	Faktor-faktor
1.	Hutan primer	Tingginya potensi produksi kayu dan non kayu yang dapat dikelola dan mampu menjadi sumber penghasilan daerah.
2.	Hutan sekunder	Tingginya laju ekstraksi hasil hutan dan suksesi hutan yang mampu meningkatkan degradasi hutan.
3.	Tempat memasang jerat	Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hutan sebagai tempat berburu untuk memenuhi pendapatan keluarga dan kebutuhan protein hewani
4.	Kebun campuran	Potensi kebun campuran sebagai sumber pendapatan menjadi acuan pembukaan hutan untuk kebun campuran.
5.	Semak belukar/bekas kebun	Kebiasaan kebun bergilir mengakibatkan tingginya perubahan penutupan lahan hutan
6.	Kampung	Laju pembangunan pemukiman/sarana prasarana
7.	Sungai besar	Banyaknya sugai besar dan kecil mengakibatkan tingkat aksesibilitas menjadi sangat rendah.
8.	Klaim adat	Terdapat klaim hak ulayat sebagai lahan komunal
9.	Klaim masyarakat	Terdapat klaim kepemilikan lahan usaha/pemukiman/sarana umum
11.	Jumlah penduduk	Tingginya jumlah penduduk menyebabkan tingginya kebutuhan lahan kebun dan pemukiman

(sumber : Rancangbangun KPH Model Yapen Papua, 2010)

Tabel 2 dan 3 menunjukkan secara umum permasalahan kepastian kawasan dan akses wilayah menjadi perhatian khusus dan menjadi dasar penentuan tujuan pembangunan KPH di Papua. Di Papua keterbatasan aksesibilitas telah mengisolasi masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi sehingga memberi dampak rendahnya produktifitas pengelolaan lahan dan hutan. Berdasarkan Identifikasi faktor-faktor tersebut maka dapat disimpulkan terdapat beberapa indikator tujuan yaitu 1).

Kelestarian Sumber Daya Hutan, 2) Terakomodirnya hak kepemilikan tanah, 3) Distribusi manfaat pengelolaan, 4) Kesejahteraan masyarakat, 5) Terjadi perubahan sosial, 6) Penyerapan tenaga kerja.

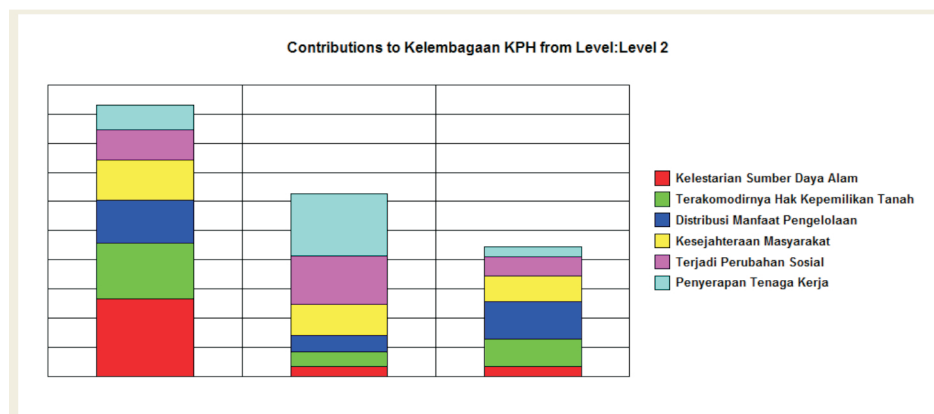
Hasil analisis AHP terhadap beberapa indikator yang diuji sebagai tujuan kelembagaan yang sesuai dengan persepsi pemangku kepentingan yaitu mempertahankan fungsi hutan dan daya dukung lingkungan seperti tertuang pada Gambar 3.



Gambar 3. Hasil Analisis Hirarki Proses tujuan pembangunan KPH Papua
 Figure 3. Results of Analysis of Hierarchy Process on KPH development goal

Dari Gambar 3 terlihat 46% responden memilih tujuan mempertahankan fungsi hutan dan daya dukung lingkungan sebagai tujuan utama dan paling penting dibandingkan tujuan yang lainnya dalam pembangunan KPHP Model. Alasan yang diungkapkan dalam pemilihan tujuan tersebut adalah jika fungsi hutan dan daya dukung lingkungan dapat dipertahankan maka kelestarian hasil dan kelestarian manfaat bagi kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud. Selain itu kondisi topografi wilayah KPH yang 60% bagian memiliki topografi agak curam sampai dengan

curam serta solum yang tipis sangat rentan terhadap terjadinya bencana alam dan sulitnya merehabilitasi lahan. Kondisi ini meyakini responden untuk menetapkan tujuan pengelolaan KPHP melalui mempertahankan fungsi hutan yang telah ditetapkan. Selanjutnya 31% responden memilih tujuan pengembangan ekonomi menjadi pilihan tujuan kedua dan 22% responden memilih tujuan keadilan alokasi manfaat bagi masyarakat adat menjadi pilihan tujuan ketiga. Beberapa indikator terwujudnya tujuan terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Kontribusi indikator tujuan terhadap tujuan KPH
 Figure 4. Contribution of the indicators to KPH goal

Beberapa indikator tercapainya tujuan fungsi hutan dan daya dukung lingkungan berturut-turut adalah : 1) terjaganya kelestarian sumberdaya alam, 2) terakomodirnya hak kepemilikan lahan, 3) kesejahteraan masya-

rakat, 4) distribusi manfaat pengelolaan, 5) terjadinya perubahan sosial dan 6) penyerapan tenaga kerja. Nilai masing-masing faktor pendukung tujuan fungsi hutan dan daya dukung lingkungan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai faktor tujuan pembangunan KPH
Table 6. Factor value for each KPH goal

Indikator Tujuan KPH	Nilai Berdasarkan Tujuan yang di Pilih		
	1	2	3
Kesejahteraan Masyarakat	0,327	0,413	0,26
Terjadi Perubahan Sosial	0,493	0,311	0,196
Terakomodirnya Hak Kepemilikan Tanah	0,143	0,571	0,286
Distribusi Manfaat Pengelolaan	0,169	0,443	0,387
Penyerapan Tenaga Kerja	0,637	0,258	0,105
Kelestarian Sumber Daya Alam	0,105	0,799	0,096
Rata-rata	0,312	0,466	0,222

Keterangan (*Remark*):

1. Pengembangan ekonomi (*Economic development*)
2. Mempertahankan Fungsi Hutan dan Daya Dukung Lingkungan (*Maintaining forest function and Environmental Carrying Capacity*)
3. Keadilan alokasi manfaat bagi masyarakat adat (*Benefit allocation to customary community*)

Tabel 6, diperoleh berdasarkan pilihan responden pengelolaan KPH Model untuk tujuan pengembangan ekonomi menempati urutan kedua. Tujuan pengembangan ekonomi di maksudkan bahwa wilayah KPH Model harus berorientasi manajemen bisnis. Menurut responden, unit KPH diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja bagi putra daerah Papua. Selain itu disampaikan juga bahwa mengingat dalam waktu dekat OTSUS di Papua akan berakhir maka sudah selaknya KPH di bangun sehingga dapat mendanai pembangunan Papua selanjutnya.

Beberapa indikator keberhasilan tujuan pembangunan ekonomi yaitu : 1). penyerapan tenaga kerja lokal, 2). perubahan kehidupan sosial ke arah kehidupan yang modern dan ekonomis, 3). meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan keluarga,

4). terdistribusinya manfaat pengelolaan baik kepada kabupaten penghasil maupun pemilik hak ulayat, 5). terakomodirnya hak kepemilikan lahan dan kelestarian sumber daya alam. Dalam pilihan tujuan ini kelestarian hasil masih kurang diperhatikan sehingga pengelolaan hutan lestari melalui bentuk KPH Model sulit akan tercapai.

Tujuan keadilan alokasi manfaat bagi masyarakat adat menjadi pilihan tujuan ketiga dalam pengelolaan KPH Model. Alasan responden memilih tujuan ini karena sampai saat ini distribusi hasil pengelolaan hutan belum dirasakan oleh masyarakat adat. HPH yang selama ini memiliki ijin pemanfaatan hasil hutan hanya memberikan bagian kecil bagi kesejahteraan masyarakat adat. Berdasarkan Peraturan Bupati masyarakat adat hanya mendapatkan Rp. 100.000/m³ dari setiap tebangan. Kondisi ini sangat ironis dengan

kenyataan rusaknya hutan adat mereka. Beberapa indikator tercapainya tujuan keadilan alokasi manfaat bagi masyarakat adat adalah 1) distribusi manfaat pengelolaan, 2) terakomodirnya hak kepemilikan tanah, 3) kesejahteraan masyarakat, 4) terjadi perubahan sosial, 5) penyerapan tenaga kerja, 6) kelestarian sumberdaya alam. Diharapkan dengan adanya distribusi manfaat yang adil menjadi motivasi besar bagi masyarakat pemilik hak ulayat untuk mengelola hutan dengan baik.

Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa tujuan Mempertahankan Fungsi Hutan dan Daya Dukung Lingkungan merupakan faktor penting dalam tujuan pembangunan KPH di Papua. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan KPHP yang tertuang dalam dokumen rancang bangun KPHP Model, serta berdasarkan kepentingan pemangku kepentingan dimana penentuan tujuan KPHP Model adalah menjamin kelestarian fungsi ekologi. Berdasarkan pemilihan tujuan tersebut maka indikator tercapainya tujuan berdasarkan kepentingan pemangku kepentingan berturut-turut adalah :

- 1) Tercapainya kelestarian sumberdaya alam, yaitu hasil yang diperoleh dari hutan dalam keadaan penuh dan memberikan hasil sepanjang masa.
- 2) Terakomodirnya hak kepemilikan tanah, yaitu pemilik hak ulayat dapat memanfaatkan dan mengelola hutannya secara mandiri.
- 3) Kesejahteraan masyarakat, yaitu terjadi peningkatan pendapatan dan kemandirian keluarga.
- 4) Terdistribusi manfaat pengelolaan, yaitu potensi hutan dapat dimanfaatkan dan memberikan hasil yang dapat dirasakan oleh penduduk yang tidak memiliki hak ulayat pada wilayah tersebut.
- 5) Terjadinya perubahan sosial, yaitu adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat dari

pola tradisional ke arah ekonomi modern yang telah mengenal pasar.

- 6) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, yaitu terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut.

Keenam indikator tersebut secara umum dapat dikelompokkan dalam ukuran kelestarian yang didekati dari tiga aspek ;

Aspek pertama, yaitu kelestarian lingkungan terkait kelanjutan sebuah ekosistem yang menjamin dukungan berkembangnya berbagai organisme secara sehat. Sementara pada saat yang sama memelihara produktifitas, daya adaptasi dan kapasitas untuk pemulihan diri. Pengelola hutan diharuskan untuk memperhatikan pembangunan proses produksi berdasarkan proses-proses alamiah.

Aspek kedua, yaitu aspek kelestarian sosial. Aspek ini mencerminkan hubungan antara norma-norma pembangunan dan sosial. Sebuah aktifitas dikatakan secara sosial lestari jika aktifitas tersebut sesuai dengan norma-norma setempat; tidak membuat norma setempat tercemari atau terdegradasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang tidak menimbulkan kecemasan-kecemasan dan ketegangan-ketegangan diluar kemampuan toleransi masyarakat dalam menerima perubahan.

Aspek ketiga, yaitu kelestarian ekonomi/produksi. Aspek ini mensyaratkan bahwa keuntungan-keuntungan yang diperoleh unit manajemen hutan bisa melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan dan mampu diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Ini termasuk produktifitas dan regenerasi dari hutan harus bisa terjamin dan masih menghasilkan keuntungan dari tahun ke tahun, dari satu generasi ke generasi berikutnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks perencanaan, tujuan pembangunan KPH mutlak didefinisikan dalam indikator sasaran, strategi untuk mencapai sasaran dan pengembangan rencana kerja dan mengelola aktivitas-aktivitas.

Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa tujuan Mempertahankan Fungsi Hutan dan Daya Dukung Lingkungan merupakan faktor penting dalam tujuan pembangunan KPH di Papua. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan KPHP yang tertuang dalam dokumen rancang bangun KPHP Model, serta berdasarkan kepentingan *stakeholders* penekanan tujuan KPHP Model adalah menjamin kelestarian fungsi ekologi. Dalam tujuan tersebut terdapat 6 (enam) indikator sasaran yang dapat diukur untuk mencapai tujuan pembangunan KPH Papua yang telah ditetapkan yaitu :1). Kelestarian Sumber Daya Hutan, 2) Terakomodirnya hak kepemilikan tanah, 3) Distribusi manfaat pengelolaan, 4) Kesejahteraan masyarakat, 5) Terjadi perubahan sosial, 6) Penyerapan tenaga kerja.

Tujuan pembangunan KPH ini selanjutnya diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana strategis pembangunan KPH Papua yang didalamnya memuat rencana kerja dalam mewujudkan tujuan bersama.

Mengacu pada kriteria dan indikator yang ditemui pada hasil penelitian ini, maka disarankan untuk dilakukan suatu kajian peluang pengembangan KPH Papua dengan menggunakan analisis SWOT.

DAFTAR PUSTAKA

Dephut. (2009). Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan upaya mitigasi terhadap perubahan iklim global. www.dephut.go.id. akses 25 Januari 2010.

Dinas Kehutanan Provinsi Papua. (2010). Rancang bangun KPH Model Yapen Papua. Tidak diterbitkan.

Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. (2010). Rancang bangun KPH Model Sorong Papua Barat. Tidak diterbitkan.

Djogo, T., Sunaryo., Suharjito, D dan Sirait, M. (2003). Bahan ajar kelembagaan dan kebijakan dalam pengembangan agroforestri. Word Agroforestry Centre (ICRAF).

Kapisa, N. (2008). Integrasi kesatuan pengelolaan hutan dalam kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua. Materi forum komunikasi multi pihak dan peluncuran buku "Memperkokoh jalinan kebijakan dan riset menuju pengelolaan hutan lestari di Tanah Papua" Balai Penelitian Kehutanan Manokwari. Tidak diterbitkan.

Karsudi. (2010). Strategi pengembangan ekowisata dalam kerangka kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Thesis pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Tidak diterbitkan.

Kayoi, M. (2008). Kebijakan baru pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua. Materi forum komunikasi multi pihak dan peluncuran buku "Memperkokoh Jalinan Kebijakan dan Riset Menuju Pengelolaan Hutan Lestari di Tanah Papua" Balai Penelitian Kehutanan Manokwari. Tidak diterbitkan.

Amafnini, P. (2008). Hutan Papua gundul dan termarginisasi. Materi forum komunikasi multi pihak dan beluncuran Buku "Memperkokoh jalinan kebijakan dan riset menuju pengelolaan hutan lestari di Tanah Papua" Balai Penelitian Kehutanan Manokwari. Tidak diterbitkan.

Pustaka Net, 2008. Analisis pembentukan kelembagaan perangkat daerah. Suatu studi kasus pada dinas energi dan sumberdaya

- mineral di Provinsi Bengkulu. Tesis Administrasi Publik. Pustaka Net.wordpress.com. akses 10 November 2010.
- Robbins, S.P. and Coulter, M. (2002). Manajemen edisi kesepuluh Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Steer R.M. and Porter, L.W. (1987). *Motivation and work behavior*. New York: Pearson Education.